

ANALISIS GENDER DALAM PROGRAM SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)

Gender Analysis in Women's Group Saving and Loans Program (SPP)

Novia Indah Lestari*) dan Ivanovich Agusta

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

*)Email : novia.indahlestari@gmail.com

ABSTRACT

Women's Group Saving and Loans Program is the development economic program implemented for women. Gender relations were analyzed using Analysis Techniques Harvard to see the profile of activity and profile access and control over resources and benefits. This research used quantitative approach and supported by qualitative approach. The purpose of this research are, to analyze time allocation of man and women in working area and household, to analyze decision making type on allocation of loan capital and management business, to analyze changes of socio-economics condition in household members of SPP, to analyze effects of decision making type on allocation loan capital and management business and the condition socio-economic, to analyze effect of time allocation of women's work towards sosio-economic condition. Result of research showed that decision making type for loan and business management was dominated by women.

Keywords: analysis techniques harvard, socio-economics condition, women's group saving and loans program

ABSTRAK

Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan program pengembangan ekonomi yang diimplementasikan bagi perempuan. Analisis gender yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Analisis Harvard untuk menganalisis profil aktivitas atau curahan waktu kerja responden berdasarkan kegiatan produktif, sosial, dan reproduktif, dan menganalisis profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis curahan waktu kerja laki-laki dan perempuan serta pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha pada rumah tangga, mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap curahan waktu kerja dan pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha, menganalisis kondisi sosial-ekonomi rumah tangga peserta SPP sebelum dan sesudah mengikuti program, dan mengetahui pengaruh curahan waktu kerja serta pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha peserta SPP terhadap kondisi sosial-ekonomi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tipe pengambilan keputusan dalam peminjaman dan pengelolaan usaha didominasi oleh perempuan.

Kata kunci : kondisi sosial ekonomi, simpan pinjam untuk kelompok perempuan, teknik analisis harvard

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia yang ditandai oleh keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakberdayaan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 29.13 juta orang atau sekitar 11.96 persen, dengan 18.48 juta orang miskin tinggal di wilayah perdesaan. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah dengan segera harus menekan angka kemiskinan serendah mungkin. Dalam mewujudkan penurunan kemiskinan tersebut, dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga diiringi dengan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan ekonomi. Indonesia telah memiliki komitmen untuk menanggulangi kemiskinan yang ditunjukkan

dengan penandatanganan "Deklarasi Millenium" sebagai komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memberantas kemiskinan. Deklarasi millenium yang lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs) merupakan program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari delapan tujuan umum. Dua diantara tujuan tersebut adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan visi MDGs, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dibentuk suatu program pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program tersebut diantaranya, mencakup PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, serta PNPM Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri

Perdesaan disusun khusus untuk mengembangkan dan membangun daerah pedesaan. Program ini berupaya untuk membangun dan mengembangkan desa melalui proses pemberdayaan, partisipasi, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan seyogyanya memperhatikan hubungan hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini diperkuat dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Menurut Vantina et.al. (2008), semakin tinggi tingkat penghargaan terhadap gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam bidang pengembangan ekonomi yang dikhususkan bagi perempuan. Dalam program SPP tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan pada sektor publik dengan membuka peluang usaha. Sesuai dengan dana pinjaman diberikan kepada perempuan yang bersedia mengikuti pelaksanaan program, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membuka berbagai usaha berdasarkan keinginan peserta program. Persyaratan untuk menjadi peserta program ini yaitu (1) perempuan yang telah menikah, (2) mendapat izin suami dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, (3) bagi perempuan dengan status janda, melampirkan surat keterangan, adapun prosedur pengajuan dana pinjaman yaitu: (1) peserta tergabung menjadi kelompok-kelompok dengan anggota maksimal 10 orang, (2) setiap peserta mengajukan dana pinjaman dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setempat, (3) dana pinjaman diberikan kepada setiap kelompok setelah proposal disetujui, (4) dana pinjaman selanjutnya dibagikan kepada setiap anggota individu, (5) setiap anggota kelompok wajib membayar angsuran per bulan dengan jumlah yang telah ditentukan besarnya. Keterlibatan perempuan di sektor publik dapat membuka peluang mereka untuk aktif dalam pembangunan. Diduga itu tidak terlepas dari peran laki-laki yang turut mendukung aktivitas publik perempuan, termasuk mempengaruhi partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam program SPP. Hasil keluaran atau pengaruh dari pelaksanaan SPP diharapkan berdampak pada perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dalam tujuan khusus program SPP, yaitu (1) mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar; (2) memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan dana usaha; (3) mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan. Berdasarkan tujuan program SPP maka seyogyanya program tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Sulistiawati (2011), terhadap program SPP menunjukkan bahwa stimulan SPP telah mendukung kegiatan usaha yang dijalankan peserta SPP, selanjutnya hal tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan peserta SPP. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian Sulistiawati (2011), pada program PNPM MP

di Desa Kemang menunjukkan bahwa PNPM MP telah mampu memenuhi kebutuhan praktis gender tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender dilihat dari aspek manfaat yang diperoleh peserta PNPM MP yang telah mampu meningkatkan perkembangan usaha dan tingkat kontribusi pendapatan. Kebutuhan strategis dilihat dari aspek kontrol peserta dalam pengambilan keputusan maupun partisipasinya dalam kelembagaan PNPM MP, perempuan relatif tinggi proporsinya partisipasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, akan tetapi tidak diikuti oleh tingginya akses dan kontrol mereka atas sumberdaya PNPM MP di satu pihak.

Perumusan Masalah

Salah satu prinsip PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender yang dilaksanakan melalui kegiatan atau program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Program SPP merupakan program yang dirancang khusus untuk perempuan yang bertujuan membantu mereka dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Walaupun ditujukan bagi perempuan, tetapi perlu dikaji relasi gender dalam pelaksanaannya, yaitu pengaruh dan kontrol laki-laki terhadap pelaksanaan dan jalannya program SPP. Keterlibatan perempuan di Desa Ciherang dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha, menyebabkan bertambahnya jam kerja perempuan, terutama dalam kegiatan produktif, sementara perempuan tidak dapat terlepas dari kegiatan reproduktifnya.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pemberian dana bantuan memberi peluang bagi peserta SPP untuk membuka usaha dalam tujuannya membantu meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan tujuan tersebut, seharusnya program SPP memberi pengaruh dalam mengurangi kemiskinan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana curahan waktu kerja laki-laki dan perempuan serta pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha pada rumah tangga peserta SPP?
2. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi peserta SPP antara sebelum dan sesudah mengikuti program?
3. Sejauh mana karakteristik responden mempengaruhi curahan waktu kerja dan pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha?
4. Sejauh mana curahan waktu kerja dan pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi rumah tangga peserta SPP?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis curahan waktu kerja laki-laki dan perempuan serta pola pengambilan keputusan terhadap

pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha pada rumah tangga peserta SPP.

2. Menganalisis kondisi sosial-ekonomi rumah tangga peserta SPP sebelum dan sesudah mengikuti program.
3. Mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap curahan waktu kerja dan pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha.
4. Mengetahui pengaruh curahan waktu kerja serta pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha peserta SPP terhadap kondisi sosial-ekonomi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait yaitu :

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna dalam memberikan pengetahuan mengenai peranan mereka dalam program pembangunan, sehingga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah khasanah dalam kajian gender.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat berguna dalam penentuan kebijakan program-program pembangunan selanjutnya, dengan melibatkan perempuan dalam program pembangunan.

Pendekatan Teoritis

Konsep Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, gender didefinisikan sebagai konsep-konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah karena kondisi sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Gender merupakan suatu hasil konstruksi sosial, dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Gender dapat berbeda di suatu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Perbedaan gender terbentuk karena banyak hal, yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, serta melalui ajaran agama dan negara. Perbedaan cara pandang menurut acuan biologis dan acuan pembelajaran sosial adalah sebagai berikut (Hubeis, 2010) :

1. Menurut acuan biologis, perbedaan perempuan dan laki-laki bersifat kodrat (tidak dapat diubah) dan merupakan sesuatu yang terberi (as a given). Contohnya adalah perempuan memiliki rahim, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki tidak dapat menggantikan peran tersebut.
2. Menurut acuan pembelajaran sosial, perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial, bukan bersifat kodrati, dan bukan merupakan suatu yang terberi (not as given).

Peran Gender dan Pembagian Kerja berdasarkan Gender

Peran gender menampilkan kesepakatan pandangan dalam masyarakat dan budaya tertentu perihal ketepatan dan kelaziman bertindak untuk seks tertentu (jenis kelamin tertentu) dan masyarakat tertentu, peran gender diklasifikasikan dalam tiga peran pokok, yaitu (Hubeis 2010):

1. Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumberdaya insani (SDI) dan tugas kerumahtanggaan, seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.
2. Peran produktif adalah peran yang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan, misalnya petani, nelayan, konsultasi, jasa, dan wirausaha.
3. Peran masyarakat (sosial) adalah peran yang terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik.

Menurut Hubeis (2010), pembagian pekerjaan menurut seks mengacu pada cara di mana semua jenis pekerjaan (reproduktif, produktif, dan pekerjaan sosial) dibagi antara perempuan dan lelaki dan bagaimana pekerjaan tersebut dinilai dan dihargai dalam suatu masyarakat atau kultur tertentu. Dalam rumah tangga, terdapat pembagian kerja yang jelas antara anggota keluarga. Pada umumnya, laki-laki dominan terhadap pekerjaan publik dan kemasyarakatan, sementara perempuan dominan terhadap pekerjaan reproduktif (domestik).

Teknik Analisis Gender

Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran antara laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam pembangunan, serta manfaat yang diperoleh dari pembangunan, pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa⁵. Teknik analisis gender terdiri atas (Puspitawati 2012):

1. Teknik Analisis Gender Model Harvard

Analisis Model Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development yang bekerja sama dengan kantor Women in Development (WID)-USAID. Model Harvard ini adalah kerangka analisis gender yang paling awal yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga). Komponen/langkah dalam kerangka analisis Harvard meliputi: (1) analisis tiga peran gender (triple roles) yang meliputi peran publik dengan kegiatan produktifnya, peran domestik dengan kegiatan reproduktifnya, peran sosial/kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya, serta (2) analisis terhadap akses, kontrol, dan faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol.

2. Teknik Analisis Gender Model Moser

Teknik analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Gender and Development (GAD). Terdapat enam alat yang digunakan dalam kerangka ini, yaitu: (1) identifikasi peranan gender (tiga peran gender yang meliputi peran produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan/kerja sosial), (2) penilaian Kebutuhan Gender yang meliputi pemenuhan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pemenuhan kebutuhan makanan, kesehatan, sumber air bersih, perumahan, dan kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan strategis gender berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinat perempuan, misalnya seperti penghapusan tindak kekerasan pada perempuan, upah/gaji yang sama dan setara, kesetaraan dalam memiliki properti, dan akses untuk mendapatkan kredit dan sumberdaya serta kontrol terhadap perempuan atas tubuhnya sendiri, (3) pemisahan data/informasi berdasarkan jenis kelamin, (4) menyeimbangkan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola kegiatan dan tugas-tugas produktif, reproduktif, dan sosial/kemasyarakatan, (5) matriks kebijakan WID (Women in Development) dan GAD (Gender and Development) untuk memberikan masukan mengenai pengarusutamaan gender, (6) pelibatan stakeholder yang meliputi organisasi perempuan dan institusi lain dalam penyadaran gender pada perencanaan pembangunan.

Pendekatan Gender

Menurut Hubeis (2010), pendekatan gender (Gender Approach atau Gender Mainstreaming Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Pendekatan gender timbul karena dilatarbelakangi oleh kegagalan berbagai pendekatan WDP (Wanita dalam Pembangunan atau Women in Development), dengan alasan ini, maka pendekatan Wanita dalam Pembangunan (WDP) diubah menjadi pendekatan Gender dan Pembangunan (JDP) yang bertujuan untuk mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender dalam pembangunan dan mereformasi KSJ (Kebutuhan Strategis Jender) sebagai cara menumbuhkan kemitrasejajaran lelaki dan perempuan dalam konteks kehidupan yang luas. Kemitrasejajaran yang dimaksud menurut Hubeis (2010) adalah kebersamaan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, pengawasan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagi upah yang lebih adil. Menurut Hubeis (2010), pendekatan Women in Development (WID) adalah:

“Pendekatan program pembangunan yang dirancang dan diperuntukkan khusus bagi perempuan dan didukung anggaran khusus untuk memungkinkan perempuan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan nasional”.

Pendekatan Women in Development (WID) menjadikan perempuan mempunyai eksklusif dalam pembangunan yang akhirnya menjebak perempuan itu sendiri dalam stereotipikasi dan ketimpangan, berdasarkan kegagalan pendekatan tersebut, maka strategi pembangunan diubah menjadi pendekatan Gender and Development (GAD)

yang berorientasi pada relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan (Nugroho, 2008). Adapun Murniati (2004) menjelaskan perbedaan antara pendekatan Women and Development (WAD), pendekatan Women in Development (WID), dan pendekatan Gender and Development (GAD) adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Women and Development (WAD)

Merupakan pendekatan ketergantungan, yang menganggap perempuan sangat berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Strategi ini hanya berfokus pada peningkatan pendapatan perempuan. Pekerjaan perempuan di sektor publik maupun domestik dianggap telah mendukung eksistensi ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Women in Development (WID)

Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh posisi perempuan yang kurang bersaing dengan laki-laki. Oleh karena itu, pendekatan ini berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan. Akan tetapi, hasilnya kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk menghemat biaya pembangunan, dan posisi perempuan tetap masih subordinat.

3. Pendekatan Gender and Development (GAD)

Pendekatan GAD berawal dari cara pandang holistik, yaitu melihat organisasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk memahami posisi perempuan yang subordinat dalam masyarakat. GAD tidak memperhatikan perempuan saja, tetapi memperhatikan perempuan dalam konstruksi sosial gender yang memberi peran tertentu bagi perempuan dan laki-laki.

Konsep Kemiskinan

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004), konsep kemiskinan dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kesenjangan antara lemahnya daya beli dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dari aspek sosial, kemiskinan merupakan indikasi dari perkembangan masyarakat yang rendah. Dipandang dari aspek politik, kemiskinan merupakan kondisi lemahnya kemandirian masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab kemiskinan yaitu karena keterbatasan wawasan, keterbatasan keterampilan, kesehatan yang buruk, dan etos kerja yang rendah.

Tipologi kemiskinan terdiri dari empat kategori yaitu, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Menurut Nikijuluw (2001), pengertian kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural adalah:

“Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor atau variabel dari luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam”

“Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang

disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu yang bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan.”

Kemiskinan struktural terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang timpang sebagai akibat dari telah terjadinya ketidakadilan pada kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama, sedangkan kemiskinan kultural terjadi sebagai akibat dari adanya budaya masyarakat dan etos kerja yang lemah (Prasetyo dan Maisaroh, 2009). Penduduk miskin menurut ukuran kemiskinan oleh BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Gender dan Kemiskinan

Masalah ekonomi dan kemiskinan menuntut perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Menurut Nursyahbani (1999) dalam Yulisti dan Nasution (2009), perempuan didorong untuk berpartisipasi aktif di sektor publik, sekaligus tetap harus menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Partisipasi wanita saat ini bukan sekadar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Secara umum alasan perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Peran perempuan dalam pembangunan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi keluarga terutama dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Selain itu, keikutsertaan perempuan dalam pembangunan mendorong terciptanya kesejajaran peran antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pendekatan anti kemiskinan yang dikemukakan oleh Nainggolan (2005), kemiskinan yang terjadi disebabkan karena kurangnya perempuan turut serta dalam kegiatan ekonomi, untuk itu, ketimpangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengikutsertakan perempuan dalam program pembangunan.

Penelitian Putri dan Yuliaty (2009) pada usaha perikanan budidaya rumput laut di Klungkung, menunjukkan bahwa peran perempuan di sana bukan hanya mencakup peran domestik yang mencakup peran sebagai istri dan ibu rumah tangga, namun juga sebagai pendukung kegiatan ekonomi keluarga. Akan tetapi, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi pada umumnya menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang dialami perempuan berupa beban kerja ganda (*over burden*), yaitu perempuan selain melakukan kegiatan ekonomi juga melakukan kegiatan domestik. Budaya patriarki yang masih mendominasi kebiasaan masyarakat, memandang bahwa kegiatan domestik lazimnya dilakukan oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga. Penelitian Yulisti dan Nasution (2009), terhadap keluarga nelayan, menyimpulkan bahwa aktivitas domestik pada keluarga nelayan lebih banyak dilakukan oleh istri daripada suami. Kedua, perempuan memiliki keterbatasan apabila terlibat dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan tersebut terlihat dari jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh perempuan serta jumlah

upah/gaji yang diterima oleh perempuan. Menurut Wirartha (2001), walaupun kini para perempuan mulai menyentuh pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan inipun merupakan perpanjangan dari pekerjaan rumah tangga misalnya bidan, juru rawat, guru, sekretaris dan pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Begitu pula mengenai soal upah dan gaji, dimana gaji pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.

Pola Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga

Pengambilan keputusan dapat dikaitkan dengan konsep kontrol dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Pengambilan keputusan dapat dilakukan pada setiap aktivitas baik aktivitas publik, aktivitas domestik, dan aktivitas sosial/kemasyarakatan dan ketiga aktivitas tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam keluarga suami dan istri memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan keluarga, peran tersebut dibedakan menjadi peran publik, peran domestik, dan peran sosial/kemasyarakatan. Pada umumnya, laki-laki atau suami lebih dominan pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas publik, sedangkan perempuan atau istri lebih berperan pada pengambilan keputusan pada aktivitas domestik. Keterlibatan istri dalam aktivitas publik khususnya dalam kegiatan produktif mencari nafkah seharusnya dapat menciptakan pengambilan keputusan yang mandiri yang lebih dilakukan oleh istri sendiri.

Sajogyo (1981) dalam Saleha (2003) mengemukakan lima tingkatan dalam pengambilan setiap keputusan, yaitu:

1. Keputusan dibuat oleh istri seorang diri tanpa melibatkan sang suami.
2. Keputusan dibuat bersama oleh suami-istri, tetapi dengan pengaruh yang lebih besar dari istri.
3. Keputusan dibuat bersama dan senilai oleh suami-istri (dengan tidak ada tanda-tanda bahwa salah satu mempunyai pengaruh yang relatif lebih besar).
4. Keputusan dibuat bersama oleh suami-istri, tetapi dengan pengaruh suami lebih besar.
5. Keputusan dibuat oleh suami seorang diri tanpa melibatkan sang istri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dimulai pada tahun 2007, program ini bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah ada sebelumnya. Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan meliputi; (a) bertumpu pada pembangunan manusia, (b) otonomi (c) desentralisasi (c) berorientasi pada masyarakat miskin (d) partisipasi (e) keadilan dan kesetaraan gender (f) demokratis (g) transparansi dan akuntabel (h) prioritas (i) keberlanjutan.

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan adalah rumah tangga

miskin yang berada di pedesaan, yang sekaligus menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian atau keberlanjutan. Perencanaan kegiatan dilakukan mulai pada tahap persiapan dan sosialisasi awal serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Pelaksanaan kegiatan merupakan melaksanakan tugas yang telah disepakati dalam pertemuan Musyawarah Antar Desa (MAD). Pestaarian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dijamin dengan memberikan manfaat dan dapat berkelanjutan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya memberikan manfaat yang positif dan berkelanjutan. Pelaku lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, prosedur, kebijakan, dan mekanisme PNPM adalah fasilitator dan mediator, yang terdiri dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan lokal di pedesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal.

Pendanaan program direncanakan, dilaksanakan, dan didanai secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah. Sumber dana dan ketentuan alokasi berasal dari (a) lembaga donor terutama World Bank, (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (d) swadaya masyarakat, (e) partisipasi dunia usaha.

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan diantaranya ialah, setiap desa berhak untuk berpartisipasi dalam program dengan syarat telah siap untuk mengadakan musyawarah bersama dengan kader desa dan mengikuti ketentuan-ketentuan PNPM; Kegiatan yang diselenggarakan oleh PNPM MP memenuhi kriteria berupa bermanfaat bagi rumah tangga miskin, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dikerjakan oleh masyarakat, didukung oleh sumberdaya yang ada, dan memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan. Setiap desa dapat mengajukan usulan untuk dapat didanai oleh dana bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program berdasarkan swadaya masyarakat. Kesetaraan dan keadilan gender dipraktekkan dalam setiap pelaksanaan program. Pelanggaran peraturan program akan dikenakan sanksi. Masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program mendapatkan bantuan dari fasilitator.

Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) adalah salah satu program yang dicanangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Program SPP memberi peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan memberikan dana usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Persyaratan pengajuan dana pinjaman yaitu setiap kelompok wajib mengajukan proposal pengajuan dana dengan melampirkan: (1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, (2) fotokopi Kartu Keluarga (KK). Program SPP memberikan dana pinjaman secara berkelompok

dengan jumlah minimal 8 orang dan maksimal 15 orang. Proposal yang telah diajukan selanjutnya akan diproses dan diverifikasi terlebih dahulu. Sebelum proposal disetujui, dilakukan survai terhadap jenis usaha dan kelayakan peserta untuk menerima program. Survai terhadap jenis usaha dilakukan untuk melihat usaha yang dikelola oleh peserta, kriteria yang dilihat dalam survai adalah bahwa peserta memang memiliki usaha dan keberlanjutan usaha yang dikelola. Kelayakan untuk menerima program meliputi kondisi peserta yang tergolong RTM serta kesanggupan peserta untuk mengembalikan angsuran per bulan.

Relasi Gender dalam Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Kemiskinan dalam perspektif gender disebabkan oleh tidak atau kurang dilibatkannya perempuan dalam kegiatan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan perempuan tersebut disebabkan pengaruh budaya patriarki (Nainggolan, 2005). Pendekatan tersebut memberi kritik atas kegiatan ekonomi yang selama ini cenderung memberi peluang lebih terhadap laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam program SPP berpengaruh terhadap relasi gender pada rumah tangga. Berdasarkan pada pembagian kerja/ aktivitas perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, perempuan cenderung melakukan lebih banyak kegiatan reproduktif, sedangkan laki-laki lebih banyak melakukan kegiatan produktif dan kegiatan sosial. Hasil penelitian Hadiprakoso (2005) menunjukkan bahwa perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan menunjukkan perempuan mengalami beban kerja ganda dan kesenjangan dalam pembagian kerja. Oleh karena itu, jika perempuan diikutsertakan dalam kegiatan produktif, maka perempuan akan melakukan kegiatan produktif sekaligus melakukan kegiatan rumah tangga.

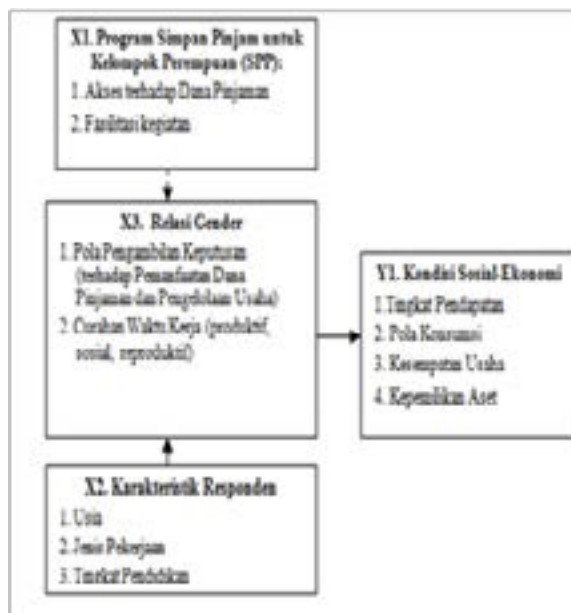
Berdasarkan pada akses dan kontrol dalam rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Laki-laki dapat menentukan proporsi keterlibatan perempuan untuk mendapatkan dan melaksanakan sumberdaya serta menentukan proporsi kontrol terhadap proses pelaksanaan program. Profil aktivitas berpengaruh pada akses peserta SPP terhadap sumberdaya. Hasil penelitian Hadiprakoso (2005) terhadap rumah tangga miskin di Desa Sudagaran, menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam hal pembagian kerja serta profil akses, kontrol, dan manfaat yang diterima. Semua profil tersebut masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan sebagian besar cenderung melakukan kegiatan reproduksi dan produksi hanya di dalam rumah, serta akses, kontrol, dan manfaat yang diterima masih dibawah laki-laki. Hanya pada manfaat pada pemenuhan kebutuhan dasar terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Kerangka Pemikiran

Pendekatan anti kemiskinan yang dikemukakan oleh Nainggolan (2005), bahwa kemiskinan yang terjadi disebabkan karena kurangnya perempuan turut serta dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, ketimpangan tersebut dapat dilakukan dengan mengikutsertakan perempuan dalam program pembangunan. Salah satu program pembangunan yang telah mengikutsertakan perempuan pada kegiatan pembangunan ialah Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dengan memberikan akses berupa dana pinjaman kepada perempuan yang memiliki jenis usaha. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik,

terutama dalam kegiatan ekonomi berpengaruh pada peranannya dalam keluarga. Pada umumnya, perempuan sebagai istri lebih dominan melakukan pekerjaan domestik dibandingkan dengan pekerjaan produktif sehingga istri cenderung mempunyai kontrol yang lebih tinggi terhadap kegiatan domestik dan mempunyai kontrol yang lebih rendah pada kegiatan produktif. Apabila perempuan terlibat pada kegiatan produktif, maka dapat mempunyai kontrol dan kuasa sendiri.

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Harvard untuk menganalisis profil aktivitas atau curahan waktu kerja berdasarkan kegiatan produktif, sosial, dan reproduktif, dan menganalisis profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. Profil akses dilihat dari akses terhadap sumberdaya dana yang didapatkan oleh peserta SPP, kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dilihat dari pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman SPP, dan pengelolaan usaha rumah tangga. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh karakteristik individu karena setiap individu memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda yang dapat berpengaruh pada setiap tindakannya. Karakteristik individu dalam penelitian ini diukur dengan usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Peranan dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif diduga berpengaruh pada kondisi sosial-ekonomi rumah tangga karena semakin produktif perempuan maka semakin meningkat kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Kondisi sosial-ekonomi pada penelitian ini diukur dengan variabel tingkat pendapatan, pola konsumsi, kesempatan usaha, dan kepemilikan aset. Lihat Gambar 1.



Keterangan:

- > Berhubungan dan diuji secara kuantitatif
- - - - -> Berhubungan dan diuji secara kualitatif

Gambar 1 Kerangka pemikiran

PENDEKATAN LAPANGAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Desa Ciherang sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa Desa Ciherang merupakan salah satu desa yang memiliki kinerja berdasarkan tingkat pengembalian yang berada di rata-rata hasil, dengan tingkat pengembalian sebesar 90% pada periode Agustus 2012. Penelitian dilaksanakan dalam waktu satu bulan yang dimulai dari bulan Oktober hingga bulan November.

Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan Simple Cluster Sampling (pengambilan Sampel Gugus Sederhana) dan Simple Random Sampling (acak sederhana). Mula-mula ditentukan gugus yang menjadi kerangka sampel penelitian. Gugus yang dipilih adalah kelompok yang mengikuti kegiatan SPP sebanyak dua kali perguliran, yang terdiri dari 12 kelompok. Selanjutnya ditentukan responden dengan Simple Random Sampling yang terdiri dari 35 rumah tangga peserta SPP yang merupakan anggota dari gugus yang telah dipilih diatas.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan:

1. Kuesioner. Pengumpulan data melalui kuesioner diberikan kepada responden dan data yang dikumpulkan adalah mengenai karakteristik responden, profil kegiatan responden dalam mengikuti SPP, profil aktivitas, akses dan kontrol, serta pengaruh sosial-ekonomi responden.
2. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Dramaga, anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), dan ketua kelompok.
3. Observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai gambaran dan keadaan lokasi.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa petunjuk teknis pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, data monografi Desa Ciherang tahun 2011, data kelompok peserta SPP, data anggota kelompok peserta SPP, data kinerja SPP, dan peta lokasi penelitian.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Analisis gender yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Analisis Harvard untuk menganalisis profil aktivitas atau curahan waktu kerja responden berdasarkan kegiatan produktif, sosial, dan reproduktif, dan menganalisis profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2007 dan SPSS for Windows versi 16.0. Data primer yang diperoleh secara kuantitatif melalui kuesioner diolah dengan membuat tabel frekuensi dan tabulasi silang. Selanjutnya, dilakukan uji statistik untuk melihat hubungan

antarvariabel menggunakan aplikasi SPSS for Windows. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan Chi-square untuk menghubungkan data nominal dengan data ordinal dan uji korelasi Tau Kendall's untuk menghubungkan data ordinal dengan data ordinal pada taraf nyata sebesar 0.05.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Profil Desa Ciherang

Kondisi Geografis

Desa Ciherang terletak di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, dengan luas sebesar 251.57 hektar. Desa Ciherang terletak tidak jauh dari ibukota kecamatan dengan jarak dari pusat kecamatan adalah 1.5 kilometer, dan dari ibukota kabupaten 25 kilometer. Batas-batas wilayah Desa Ciherang yaitu, sebelah utara Kelurahan Margajaya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Laladon, sebelah selatan berbatasan Desa Ciapus dan Desa Sukawening, sebelah barat berbatasan dengan Desa Dramaga dan Desa Sinarsari. Desa Ciherang berada pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar 250-320 Celcius dan banyaknya curah hujan sebesar 250-450 mm/tahun. Desa Ciherang memiliki 11 Rukun Warga (RW), yang terdiri dari 49 Rukun Tetangga (RT).

Sarana dan Prasarana

Sarana yang terdapat di Desa Ciherang antara lain sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana transportasi. Sarana peribadatan yang ada adalah masjid berjumlah 15 buah dan mushola sebanyak 14 buah. Sarana kesehatan dengan fasilitas 1 buah Poliklinik/ Balai Pelayanan Masyarakat, sarana pendidikan dengan 4 buah Taman Kanak-Kanak (TK) dan 4 buah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yaitu SDN Ciherang Kaum, SDN I Ciherang, SDN II Ciherang, dan SDN IV Ciherang.

Di Desa Ciherang terdapat pasar jumat, tetapi berjualan setiap hari yang berlokasi di daerah Loceng Indah. Pasar tersebut tidak terlalu besar dan tidak menjual keperluan yang lengkap, sehingga masyarakat desa banyak yang berbelanja di pasar Dramaga yang lokasinya tidak jauh dari Desa Ciherang dengan akses yang mudah. Transportasi yang terdapat di Desa Ciherang yaitu berupa angkutan umum dan jasa ojek. Angkutan umum menghubungkan Desa Ciherang dengan Terminal Laladon yang waktu tempuhnya sekitar 15 menit.

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Ciherang adalah 12158 jiwa, terbagi menjadi 3213 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6277 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5881 jiwa. Jumlah penduduk menurut agama terdiri dari 11949 orang beragama Islam, 90 orang beragama Protestan, 80 orang beragama Khatolik, 14 orang beragama Hindu, dan 25 orang beragama Budha. Sebagian besar penduduk adalah kelompok umur 0-4 tahun, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 751 orang (11.9%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 663 orang (11.27%).

Sedangkan penduduk dengan kelompok umur 55-59 tahun baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan jumlah yang paling rendah yaitu masing-masing berjumlah 232

(3.70%) orang dan 197 orang (3.35%). Menurut acuan usia Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006) yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) dewasa awal dengan usia antara 18-29 tahun; (2) dewasa pertengahan dengan usia antara 30-50 tahun; (3) dewasa tua dengan usia diatas 50 tahun. Penduduk Desa Ciherang pada kategori usia dewasa awal sebanyak 3449 orang, pada kategori dewasa pertengahan sebanyak 3428 orang, dan pada kategori dewasa tua sebanyak 1642 orang.

Kondisi Pendidikan

Pendidikan penduduk berdasarkan Data Monografi Desa tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang belum sekolah berjumlah 763 orang. Jumlah penduduk yang tidak tamat SD dan tamat SD masing-masing sebesar 105 orang dan 1509 orang. Jumlah penduduk yang tamat SLTP dan tamat SLTA masing-masing sebesar 3221 orang dan 4829 orang. Jumlah penduduk yang tamat Akademi/ Diploma dan Perguruan Tinggi masing-masing berjumlah 895 orang dan 584 orang.

Jumlah dan persentase tingkat pendidikan penduduk Desa Ciherang dapat dilihat pada Tabel 4. Tingkat pendidikan penduduk yang paling besar jumlahnya adalah tamat SLTA dengan persentase sebesar 40.6 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak tamat SD menunjukkan jumlah yang paling rendah dengan persentase sebesar 0.9 persen. Tidak terdapat bangunan SLTP maupun SLTA di Desa Ciherang, tetapi jumlah penduduk yang tamat SLTP dan SLTA lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tamat SD. Hal ini karena lokasi bangunan SLTP dan SLTA yang ada di kecamatan ataupun di Kabupaten lokasinya dapat dijangkau dengan akses yang mudah oleh penduduk.

Kondisi Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Ciherang terdiri dari beragam mata pencaharian. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang/wiraswasta dan buruh. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang/wiraswasta sebanyak 2427 orang (47.43%), sedangkan yang bermata pencaharian sebagai buruh sebanyak 1231 orang (24.05%). Berdasarkan penggolongan jenis pekerjaan yang meliputi sektor usaha dan sektor non usaha, persentase penduduk yang bekerja pada sektor usaha adalah sebesar 47.4 persen.

Jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani lebih rendah dibandingkan dengan wiraswasta, buruh, pedagang, dan PNS yaitu sebanyak 398 orang (7.78%). Sedangkan berdasarkan Data Monografi Desa Ciherang tahun 2011 luas lahan di Desa Ciherang sebagian besar adalah lahan sawah dan ladang masing-masing sebesar 171 hektar dan 20.34 hektar.

Tabel 1. Jumlah dan persentase penduduk Desa Ciherang berdasarkan penggolongan jenis pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	N	%
1	Sektor usaha	2427	47.4
2	Sektor non usaha	2690	52.6
Jumlah		5117	100.0

HASIL PENELITIAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Usia

Peneliti mengkategorikan usia berdasarkan kategori Havighurst (1985) dalam Mugniesyah (2006) yaitu dewasa awal, dengan usia antara 18-29 tahun, dewasa pertengahan dengan usia antara 30-50 tahun, dan dewasa tua dengan usia lebih dari 50 tahun. Usia responden baik laki-laki dan perempuan sebagian besar tergolong pada kategori dewasa pertengahan, yaitu usia antara 30-50 tahun. Persentase laki-laki pada usia dewasa pertengahan sebanyak 22 orang (62.9%) dan perempuan sebanyak 26 orang (74.3%).

Tingkat usia responden pada dewasa tua lebih tinggi daripada tingkat usia dewasa awal. Pada tingkat usia dewasa tua, jumlah responden laki-laki sebanyak 12 orang (34.3%) dan perempuan sebanyak 6 orang (17.1%). Pada tingkat usia dewasa awal, jumlah responden laki-laki sebanyak 1 orang (2.9%) dan perempuan sebanyak 3 orang (8.6%). Tingkat usia perempuan lebih muda dibandingkan dengan laki-laki apabila dilihat pada tingkat usia dewasa awal dan dewasa akhir. Pada dewasa awal, jumlah responden laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah responden perempuan, dan sebaliknya pada dewasa akhir jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden perempuan.

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden perempuan sebagian besar adalah pada sektor usaha, karena persyaratan mengikuti program SPP adalah telah memiliki usaha, dan sebagian besar responden laki-laki bekerja pada sektor non usaha. Jenis pekerjaan responden laki-laki yang bekerja pada sektor non usaha sebagian besar adalah pekerjaan di sektor informal yaitu seperti sopir dan buruh bangunan. Pekerjaan sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah dengan sektor formal (Widodo, 2006).

Jumlah perempuan yang bekerja pada sektor non usaha sebanyak 4 orang (11.4%). Responden perempuan yang bekerja di sektor non usaha ialah yang memiliki jenis pekerjaan ganda, yaitu selain memiliki jenis usaha mereka juga bekerja di sektor non usaha. Pekerjaan ganda dilakukan responden perempuan untuk menambah penghasilan sehari-hari. Jenis pekerjaan responden perempuan di sektor non usaha diantaranya ialah staf desa, pembantu rumah tangga, dan guru. Sebagian besar pekerjaan di sektor non usaha merupakan pekerjaan yang utama sedangkan pekerjaan di sektor usaha adalah hanya sebagai sampingan. Pada responden laki-laki, sebanyak 15 orang (42.0%) bekerja di sektor usaha. Jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan di sektor non usaha yaitu sebanyak 19 orang (54.3%).

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar adalah rendah dengan jumlah

masing-masing sebanyak 26 orang (74.3%) dan 28 orang (80.0%). Jumlah responden laki-laki dengan tingkat pendidikan tinggi lebih besar dibandingkan dengan responden perempuan yaitu sebanyak 9 orang (25.7%), sedangkan responden perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 7 orang (20.0%).

PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DI DESA CIHERANG

Pelaksanaan Program

Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ciherang dilaksanakan mulai tahun 2009. Program tersebut memberikan dana pinjaman kepada kelompok-kelompok perempuan untuk menjalankan usaha yang dibentuk berdasarkan lokasi tempat tinggal yang berdekatan. Dana pinjaman diberikan secara bergulir setiap periode dengan masa waktu setiap periode rata-rata adalah tiga bulan. Kelompok-kelompok yang akan meminjam dana diwajibkan mengajukan proposal terlebih dahulu serta memenuhi persyaratan yang berupa (1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, dan (2) fotokopi Kartu Keluarga (KK). Dana awal yang dialokasikan untuk kegiatan SPP desa Ciherang sebesar Rp 186.500.000 dan dana tersebut meningkat setiap tahunnya. Bagi peserta yang baru pertama kali mengikuti perguliran pada umumnya dana pinjaman yang diberikan sebesar Rp 500000, sedangkan untuk kelompok yang lebih dari satu kali mengajukan perguliran, dana dapat dinaikkan hingga maksimal Rp 2000000.

Sampai dengan bulan September 2012 terdapat 36 kelompok perempuan yang telah mendapatkan dana pinjaman selama satu kali hingga empat kali perguliran. Akan tetapi dari 36 kelompok tersebut terdapat beberapa kelompok yang sudah tidak aktif (berhenti meminjam). Kelompok yang masih aktif meminjam hingga perguliran ke-9 (November 2012) berjumlah 26 kelompok. Kelompok yang sudah tidak aktif lagi disebabkan adanya keputusan semua anggota kelompok yang tidak ingin melanjutkan peminjaman, dan keputusan pihak UPK dan KPMD untuk tidak memperbolehkan kelompok tersebut mengajukan pinjaman karena statusnya bermasalah. Permasalahan umum yang sering terjadi yaitu kemacetan pembayaran angsuran, ini karena adanya penyelewengan dana pengembalian yang dilakukan oleh kelompok, baik dilakukan oleh ketua kelompok maupun anggota kelompok.

Berdasarkan prosedur UPK, kelompok yang bermasalah dan tidak dapat membayar angsuran per bulan hingga batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa hukuman pidana yang ditujukan untuk ketua kelompok, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), atau seseorang yang bukan anggota kelompok tetapi melakukan penyelewengan terhadap uang angsuran. Apabila anggota kelompok yang melakukan kesalahan masih dimaklumi, tetapi dari setiap permasalahan kemacetan pembayaran yang terjadi di Desa Ciherang belum pernah ada yang dikenakan hukuman pidana. Hal ini karena ada perlindungan dari pihak Kepala Desa Ciherang, yang berusaha untuk menyelesaikan masalah kemacetan pembayaran dengan cara musyawarah dan sangat menghindari hukuman pidana.

Akses Perempuan Terhadap Dana Pinjaman

Menurut Hubeis (2010), kemiskinan perempuan terkait dengan status ekonomi rendah mereka, termasuk "...tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi", serta kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan, lahan dan pewarisan), kurangnya akses pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka dalam penentuan keputusan. Status ekonomi perempuan rendah karena peran reproduktif yang dinilai masih sangat melekat pada mereka, dan menyebabkan partisipasi yang kurang pada peran produktif.

Berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, program PNPM Mandiri Pedesaan melaksanakan prinsip tersebut dengan membuat program yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan yaitu Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Program ini memberikan akses berupa dana pinjaman kepada perempuan yang khususnya adalah ibu rumah tangga yang mempunyai jenis usaha. Kegiatan utama program SPP adalah memberikan dana pinjaman kepada perempuan secara berkelompok dengan memberikan batas periode waktu pembayaran angsuran. Akses peserta dalam program SPP terdiri atas pemberian dana pinjaman (kredit) dan pelatihan. Dalam segi akses terhadap dana pinjaman, sebanyak 26 responden menyatakan mudah untuk mendapatkan dana pinjaman, responden perempuan menyatakan bahwa tidak mengalami kesulitan karena persyaratan yang cukup mudah. Sebanyak 9 responden menyatakan sulit untuk mendapatkan dana pinjaman, hal ini karena dalam proses pencairan dana yang dinilai cukup lama. Sebagian besar responden mendapatkan dana pinjaman antara Rp 1000000 sampai Rp 1500000.

Menurut anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Ibu MIS (40 tahun) menjelaskan bahwa pencairan dana pinjaman SPP yang lama karena sebelumnya dilakukan proses verifikasi proposal terlebih dahulu. Setelah proposal diterima oleh tim UPK di Kecamatan, dilakukan survai terhadap peserta yang mengajukan perguliran mengenai kondisi peserta dan kemampuan peserta dari segi ekonomi maupun kondisi jenis usahanya.

Kemudahan akses perempuan terhadap dana pinjaman dalam program SPP, membuat semakin terbukanya peluang perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi khususnya untuk berusaha. Dana pinjaman yang lebih ditujukan khusus untuk perempuan, membuat kontrol terhadap pemanfaatan dana dan pengelolaan usaha lebih didominasi oleh perempuan. Pola pengambilan keputusan terhadap dana pinjaman dan pengelolaan usaha sebagian besar didominasi oleh istri. Oleh karena itu, dengan dana pinjaman yang lebih dikhususkan untuk perempuan maka memberikan peluang bagi perempuan untuk menjalankan usahanya secara mandiri. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi juga menyebabkan bertambahnya kegiatan produktif perempuan, sementara perempuan masih memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan reproduktif dalam rumah tangga sehingga perempuan mengalami beban kerja yang berlebihan.

Selain memberikan dana pinjaman (kredit) kepada perempuan yang memiliki jenis usaha, program SPP mengadakan kegiatan pelatihan dan pembinaan. Akan tetapi, pelatihan tidak untuk semua anggota kelompok peserta SPP. Pelatihan hanya dikhususkan kepada anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) dan ketua

kelompok se-kecamatan. Kegiatan yang dilakukan saat pelatihan diantaranya yaitu, pengarahan dan pembinaan mengenai peraturan yang berlaku, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, penjelasan mengenai proses pengembalian angsuran, sanksi, dan tanggung jawab ketua terhadap kelompok. Pelatihan diadakan minimal satu kali dalam setiap perguliran. Hasil wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan Dramaga, Bapak UWN menyatakan bahwa pelatihan diadakan dikhususkan kepada anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) dan ketua kelompok, karena menurutnya perlu pembinaan terlebih dahulu kepada para pengurus.

Fasilitasi Kegiatan

Fasilitator yang terlibat dalam program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) terdiri atas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM). Tugas utama KPM adalah:

1. Memfasilitasi masyarakat terkait perumusan masalah-masalah di desa.
2. Membantu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program-program yang ada di desa dalam perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan.
3. Memfasilitasi masyarakat untuk mengadakan musyawarah desa.
4. Memfasilitasi masyarakat untuk mengusulkan program pembangunan.
5. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan.

KPM melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada dua bidang pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, dan pembangunan jembatan. Tanggung jawab terhadap pembangunan fisik dipegang oleh seorang laki-laki. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan seperti kegiatan pengembangan ekonomi untuk perempuan. Tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut dipegang oleh seorang perempuan. Pelaksanaan musyawarah yang difasilitasi oleh KPM Desa Ciherang diantaranya yaitu Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). MKP (Musyawarah Khusus Perempuan) dilaksanakan di balai desa dengan peserta dari perwakilan tiap kelompok SPP, dan juga perwakilan perempuan bukan anggota SPP. Musyawarah diutamakan untuk membahas tentang usulan program khusus untuk perempuan. Hasil yang diharapkan dalam MKP adalah: (1) ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, (2) ditetapkannya usulan dari kelompok perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam, (3) terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa prioritas unggulan.

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan MKP yaitu: (1) mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar permasalahannya, (2) menentukan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi perempuan untuk mengajukan beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Ciherang. Prioritas kegiatan yang

pada umumnya diusulkan oleh perempuan adalah kegiatan simpan pinjam dan kegiatan fisik seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan demikian, kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator dari UPK Kecamatan dan juga KPMD Desa Ciherang telah berupaya merefleksikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dengan mengikutsertakan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan khusus untuk perempuan.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yaitu dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan berarti upaya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan ekonomi, politik, serta mengakses aset produktif⁷. Berdasarkan fasilitasi yang sudah memberikan kesempatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, maka peran fasilitasi dalam program SPP dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola kegiatan ekonomi serta meningkatkan kegiatan produktifnya.

CURAHAN WAKTU KERJA DAN POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA RESPONDEN

Curahan Waktu Kerja

Curahan waktu kerja berkaitan dengan peran dan pembagian kerja antara suami dan istri dalam rumah tangga yang dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu (1) kegiatan produktif, (2) kegiatan reproduktif, (3) kegiatan sosial/kemasyarakatan. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kegiatan produktif responden dalam penelitian ini diukur berdasarkan kegiatan responden dalam mencari sumber penghasilan (nafkah). Kegiatan reproduktif adalah kegiatan yang berkaitan dengan melakukan aktivitas rumah tangga yang diukur dari kegiatan memasak, mencuci, membersihkan rumah, belanja kebutuhan rumah tangga, dan mengasuh anak. Kegiatan sosial/kemasyarakatan dalam penelitian ini diukur berdasarkan kegiatan sosial yang berkaitan dengan masyarakat seperti pengajian, musyawarah desa/RT/RW, membantu hajatan, menghadiri undangan hajatan, kerja bakti, takziah, dan mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Berdasarkan kegiatan produktif, dapat disimpulkan bahwa curahan waktu kerja suami lebih besar dibandingkan dengan curahan waktu kerja istri dengan jumlah masing-masing sebesar 10.0 jam/hari dan 7.6 jam/hari.

Kegiatan produktif suami lebih besar jumlahnya pada sektor non-usaha dengan jumlah 6.3 jam/hari, sedangkan kegiatan produktif istri lebih besar jumlahnya pada sektor usaha dengan jumlah 6.9 jam/hari. Kegiatan produktif istri yang bekerja di sektor usaha terdiri dari kegiatan menjual produk/jasa, serta berbelanja dan mempersiapkan kebutuhan untuk usaha. Kegiatan menjual produk/jasa misalnya seperti menjual gorengan, menjual mainan, membuka warung, dan menawarkan barang kepada pembeli. Responden dengan jenis usaha makanan, menjual makanannya dengan menyediakan tempat di rumah, ataupun di luar rumah.

Berdasarkan kegiatan reproduktif dapat disimpulkan bahwa curahan waktu kerja istri lebih besar dibandingkan dengan curahan waktu kerja suami dengan jumlah masing-masing

sebesar 5.53 jam/hari dan 0.92 jam/hari. Curahan waktu kerja istri paling besar adalah pada kegiatan memasak sebesar 1.7 jam/hari, kemudian kegiatan mengasuh anak sebesar 1.5 jam/hari, dan kegiatan mencuci sebesar 1.4 jam/hari. Curahan waktu kerja suami paling besar adalah pada kegiatan membersihkan rumah dan mengasuh anak sebesar 0.3 jam/hari, kemudian kegiatan mencuci sebesar 0.2 jam/hari. Berdasarkan kegiatan sosial/kemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa curahan waktu kegiatan sosial/kemasyarakatan istri lebih besar dibandingkan dengan suami masing-masing sebesar 0.68 jam/hari dan 0.52 jam/hari. Kegiatan sosial istri lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan suami pada kegiatan pengajian, membantu hajatan, kematian, dan PKK/Posyandu.

Curahan waktu kegiatan sosial istri yang paling besar ialah pada kegiatan pengajian. Kegiatan sosial suami lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan istri pada kegiatan kerja bakti, dan musyawarah desa/RT/RW. Curahan waktu kegiatan sosial/kemasyarakatan responden suami dan responden istri memiliki jumlah yang rendah, hal ini karena responden memang jarang melakukan kegiatan sosial ataupun karena kegiatan sosial seperti kerja bakti, rapat RW/RT, dan musyawarah desa jarang dilaksanakan bahkan kegiatan kerja bakti tidak ada di salah satu RT di Desa Ciherang.

Tabel 2 menunjukkan bahwa istri melakukan pekerjaan ganda dan mengalami beban berlebih (*overburden*) terhadap tiga kegiatan aktivitas. Selain melakukan pekerjaan produktif, istri juga melakukan pekerjaan reproduktif (*domestik*) dan kegiatan sosial/kemasyarakatan. Oleh karena itu, jika perempuan diikutsertakan dalam kegiatan produktif, maka perempuan akan melakukan kegiatan produktif sekaligus melakukan kegiatan rumah tangga. Jumlah curahan waktu kerja istri berdasarkan ketiga aktivitas tersebut jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah curahan waktu kerja suami. Jumlah curahan waktu kerja dari tiga aktivitas istri sebesar 13.81 jam/hari sedangkan jumlah curahan waktu kerja suami dari tiga aktivitas sebesar 11.44 jam/hari, lebih rendah dari istri.

Peneliti mengkategorikan kegiatan produktif menjadi dua kategori berdasarkan rata-rata curahan waktu kerja responden laki-laki dan perempuan dalam satu hari, yaitu: (1) rendah, apabila kegiatan produktif responden < 8 jam/hari, (2) tinggi, apabila kegiatan produktif responden \geq 8 jam/hari. Sebagian besar responden memiliki kegiatan produktif yang tinggi dengan jumlah sebanyak 41 orang. Sebesar 71.4 persen responden laki-laki memiliki curahan waktu kegiatan produktif yang tinggi, sementara sebesar 54.3 persen responden perempuan memiliki curahan waktu kegiatan produktif yang rendah.

Kegiatan sosial dikategorikan menjadi dua berdasarkan rata-rata curahan waktu kerja responden laki-laki dan perempuan dalam satu hari, yaitu: (1) rendah, apabila kegiatan sosial responden < 0.2 jam/hari, (2) tinggi, apabila kegiatan sosial responden \geq 0.2 jam/hari. Baik responden laki-laki maupun responden perempuan memiliki kegiatan sosial yang tergolong tinggi, akan tetapi persentase kegiatan sosial lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Besarnya kegiatan sosial perempuan dibandingkan dengan laki-laki karena mayoritas perempuan mengikuti pengajian yang frekuensinya minimal satu kali dalam satu minggu.

Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan curahan waktu kerja

Kegiatan	Curahan waktu		Jumlah
	Suami	Istri	
Kegiatan produktif (jam) per hari			
Bekerja di sektor non usaha	6.3	0.7	7.0
Bekerja di sektor usaha	3.7	6.9	10.6
Jumlah	10.0	7.6	17.6
Kegiatan reproduktif (jam) per hari			
Membersihkan rumah	0.3	0.9	1.2
Mencuci	0.2	1.4	1.6
Mengambil air di kali	0.06	0.03	0.09
Memasak	0.06	1.7	1.76
Mengasuh anak	0.3	1.5	1.8
Jumlah	0.92	5.53	6.45
Kegiatan sosial/kemasyarakatan (jam) per hari			
Pengajian	0.3	0.5	0.8
Kerja bakti	0.1	0.05	0.15
Membantu hajatan	0.02	0.08	0.1
Menghadiri undangan hajatan	0.05	0.05	0.1
kematian	0.002	0.001	0.03
PKK/Posyandu	0.002	0.001	0.03
Musyawarah Desa/RT/RW	0.05	0.001	0.06
Jumlah	0.52	0.68	1.27

Kegiatan sosial yang diadakan di masjid maupun majelis di Desa Ciherang memang banyak diadakan untuk perempuan khususnya ibu rumah tangga. Sementara, kegiatan sosial yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki seperti kerja bakti, musyawarah desa, dan rapat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) jarang dilaksanakan di Desa Ciherang. Kerja bakti dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan, sementara di beberapa wilayah RT tidak sama sekali diadakan kerja bakti.

Kegiatan reproduktif dikategorikan menjadi dua berdasarkan rata-rata curahan waktu kerja responden laki-laki dan perempuan dalam satu hari, yaitu: (1) rendah, apabila kegiatan reproduktif responden < 3 jam/hari, (2) tinggi, apabila kegiatan reproduktif responden ≥ 3 jam/hari. Sebesar 54.3 persen kegiatan reproduktif responden tergolong rendah, dan sebesar 45.7 persen tergolong tinggi. Responden laki-laki sebagian besar memiliki curahan waktu kegiatan reproduktif yang rendah dengan jumlah sebanyak 29 orang (82.9%), sebaliknya curahan waktu kegiatan reproduktif perempuan sebagian besar tergolong

tinggi yaitu dengan jumlah sebanyak 26 orang (74.3%).

Pola Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga terhadap Pemanfaatan Dana Pinjaman dan Pengelolaan Usaha

Menurut acuan Saleha (2003), pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) pengambilan keputusan yang didominasi oleh istri; (2) pengambilan keputusan oleh suami istri senilai; (3) pengambilan keputusan yang didominasi oleh suami. Pola pengambilan keputusan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha.

Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha

Pola pengambilan keputusan	N	%
Dominan istri	28	80.0
Bersama-setara	2	5.7
Dominan suami	5	14.3
Jumlah	35	100.0

Sebagian besar pengambilan keputusan didominasi oleh istri dengan jumlah sebanyak 27 orang (77.1%). Sebanyak 6 orang (17.1%) pengambilan keputusan didominasi oleh suami dan sebanyak 2 orang (5.7%) pengambilan keputusan setara. Sebagian besar keputusan rumah tangga peserta SPP terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha lebih didominasi oleh istri. Berdasarkan lima aktivitas pengambilan keputusan, aktivitas yang paling dominan diputuskan oleh istri adalah penetapan harga produk. Aktivitas yang paling rendah diputuskan oleh istri adalah keputusan meminjam dana dan keputusan pemanfaatan dana. Pengambilan keputusan bersama (suami dan istri) yang paling dominan adalah pada aktivitas keputusan meminjam dana dan yang paling rendah adalah pada aktivitas penetapan harga. Pengambilan keputusan oleh suami yang paling dominan adalah pada aktivitas keputusan dalam pemanfaatan dana dan keputusan dalam pemilihan jenis usaha, sedangkan yang paling rendah adalah keputusan dalam meminjam dana pinjaman. Pada aktivitas keputusan meminjam dana, istri menyatakan bahwa walaupun dalam proses pengajuan dana harus melalui izin dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami, namun hal tersebut hanya formalitas dan pada akhirnya istri yang mengambil keputusan secara penuh.

Aktivitas keputusan dalam pemilihan jenis usaha adalah kontrol dan kuasa suami maupun istri dalam memilih dan menentukan jenis usaha yang akan dikelola. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 46 orang (65.7%) menyatakan keputusan ini lebih didominasi oleh istri. Aktivitas dalam pengelolaan usaha adalah kontrol dan kuasa suami maupun istri dalam mengelola usaha. Sebagian besar responden menyatakan usaha dikelola oleh istri yaitu dengan jumlah sebanyak 50 orang (71.4%). Sebanyak 6 orang (8.6%) menyatakan usaha dikelola oleh suami, dan sebanyak 14 orang (20.0%) menyatakan usaha dikelola bersama. Aktivitas dalam penetapan harga adalah kontrol dan kuasa suami maupun istri dalam menetapkan harga

produk/barang. Sebagian besar responden menyatakan bahwa keputusan dalam menetapkan harga produk/barang lebih kepada istri, hal ini karena sebagian besar istri yang mengelola usaha. Sementara untuk keputusan penetapan harga yang diputuskan oleh suami sebagian besar adalah usaha yang dikelola secara bersama ataupun yang dikelola oleh suami seorang diri.

Tabel 4. Jumlah dan persentase responden berdasarkan pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha

Aktivitas	Pengambilan keputusan n (%)		
	Suami	Bersama	Istri
Keputusan meminjam dana	2 (2.9)	30 (42.9)	38 (54.3)
Keputusan pemanfaatan dana	10 (14.3)	22 (31.4)	38 (54.3)
Pemilihan jenis usaha	10 (14.3)	14 (20.0)	46 (65.7)
Pengelolaan usaha	6 (8.6)	14 (20.0)	50 (71.4)
Penetapan harga	8 (11.4)	10 (14.3)	52 (74.3)

KONDISI SOSIAL-EKONOMI RUMAH TANGGA

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan diukur berdasarkan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh anggota rumah tangga. Dikategorikan menjadi tiga yaitu rendah apabila pendapatan rumah tangga < Rp 1500000, sedang apabila pendapatan rumah tangga Rp 1500000 hingga ≤ Rp 3000000, dan tinggi apabila pendapatan rumah tangga > Rp 3000000. Tingkat pendapatan rumah tangga responden sebagian besar adalah tergolong kategori tinggi yaitu dengan persentase sebesar 45.7 persen. Pendapatan rumah tangga responden mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah mengikuti program. Sebelum mengikuti program, rumah tangga responden dengan pendapatan rendah sebanyak 11 rumah tangga (31.4%) dan jumlahnya menurun menjadi 7 rumah tangga (20.0%) setelah mengikuti program. Pada kategori pendapatan sedang jumlah rumah tangga sebelum mengikuti program sebanyak 11 rumah tangga (31.4%), dan jumlahnya meningkat menjadi 12 rumah tangga (34.3%) setelah mengikuti program. Responden menyatakan meningkatnya pendapatan rumah tangga karena setelah mengikuti program dana usaha menjadi bertambah, sehingga responden dapat meningkatkan penjualan usahanya.

Penggolongan tingkat pendapatan rumah tangga, selain menggunakan rata-rata pendapatan dari seluruh responden, juga diukur berdasarkan kriteria pendapatan berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten Bogor tahun 2009 dan tahun 2012. UMK Kabupaten Bogor pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 991.714 dan UMK Kabupaten Bogor tahun 2012 sebesar Rp 1269320. Berdasarkan penggolongan pendapatan berdasarkan UMK Kabupaten Bogor tahun 2009 maupun berdasarkan UMK Kabupaten Bogor tahun

2012, sebagian besar pendapatan rumah tangga peserta SPP adalah tergolong tinggi. Hal ini berarti, program SPP di Desa Ciherang belum ditujukan kepada seluruh rumah tangga miskin (RTM) yang ada di Desa Ciherang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Dramaga, dana pinjaman SPP memang ditujukan kepada rumah tangga miskin (RTM), akan tetapi, pada akhirnya dilihat kembali kesanggupan RTM dalam membayar angsuran per bulannya. Apabila RTM tidak dapat membayar angsuran per bulan, maka dana pinjaman tidak dapat diberikan. Secara keseluruhan, dari 35 rumah tangga, peningkatan pendapatan hanya sebesar 5.7 persen.

Pola Konsumsi

Pola konsumsi suatu rumah tangga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Hukum ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi pula persentase atau porsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan (semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan) (Rendanikusuma, 2012). Pola konsumsi dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah alokasi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi bahan pangan (makanan) yang dikategorikan menjadi dua, yaitu rendah apabila alokasi pengeluaran untuk konsumsi makanan < 50%, dan tinggi apabila alokasi pengeluaran untuk konsumsi makanan ≥ 50%.

Pola konsumsi responden mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah mengikuti program SPP. Pola konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sesudah mengikuti program, pada kategori konsumsi tinggi, sebelum mengikuti program jumlahnya sebanyak 21 rumah tangga (60.0%), sesudah mengikuti program menurun menjadi sebanyak 18 rumah tangga (51.4%). Pada kategori konsumsi rendah, sebelum mengikuti program jumlahnya sebanyak 14 rumah tangga (40.0%), sesudah mengikuti program meningkat menjadi sebanyak 17 rumah tangga (48.6%). Perubahan pola konsumsi rumah tangga responden berkaitan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga responden. Berdasarkan tingkat pendapatan diketahui bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga responden meningkat, tetapi pola konsumsi rumah tangga responden menurun. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, maka pola konsumsi semakin menurun yang berarti apabila pendapatan meningkat jumlah pengeluaran konsumsi (pengeluaran untuk kebutuhan makanan) tidak berubah atau semakin rendah jumlah pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi.

Kesempatan Usaha

Seluruh rumah tangga responden memiliki jenis usaha karena persyaratan meminjam dana di SPP adalah harus memiliki jenis usaha. Secara umum, jenis usaha yang dikelola responden merupakan usaha kecil yang bersifat informal dan tidak memerlukan izin usaha. Kesempatan usaha dalam penelitian ini diukur dari kesempatan rumah tangga responden dalam membuka jenis usaha baru setelah meminjam dana dari SPP. Jenis usaha yang paling banyak dimiliki oleh responden adalah usaha makanan sebesar 31.4 persen dengan sebagian besar responden menjual gorengan dan kue.

Sebesar 22.9 persen responden dengan usaha menjual

pakaian jadi dan barang kerajinan tangan, pakaian jadi hampir seluruhnya dijual dengan sistem kredit (hutang) yang dijual kepada ibu-ibu rumah tangga. Responden dengan jenis usaha sembako sebesar 17.1 persen dengan sebagian responden menjualnya dengan membuka warung dan sebagian responden menjualnya dengan sistem kredit (hutang) kepada ibu-ibu rumah tangga. Responden dengan jenis usaha di bidang jasa terdiri dari usaha salon kecantikan dan usaha jahit (konveksi) dalam skala kecil.

Sebanyak 28 orang (80%) menyatakan bahwa kesempatan untuk membuka usaha baru tidak mudah dan sebanyak 7 orang (20.0%) menyatakan mudah. Responden dengan kesempatan usaha tidak mudah menyatakan bahwa belum dapat membuka usaha baru karena belum memiliki dana cukup untuk membuka usaha baru yang diinginkan. Responden dengan kesempatan usaha mudah menyatakan bahwa sudah dapat membuka usaha baru setelah mengikuti program. Beberapa responden menyatakan bahwa dengan meminjam dana dari SPP terdapat tambahan dana untuk menambah usahanya. Jenis usaha yang dapat dibuka oleh responden rata-rata adalah usaha makanan.

Tabel 5 Distribusi responden berdasarkan penggolongan jenis usaha pertanian dan non pertanian

Jenis usaha	N	%
Pertanian	22	62.9
Non pertanian	13	37.1
Jumlah	35	100.0

Kepemilikan Asset

Kepemilikan asset adalah jumlah asset yang dimiliki oleh rumah tangga responden yang diukur dari kepemilikan lahan/tanah/sawah, kendaraan, dan barang elektronik. Dikategorikan menjadi dua, yaitu rendah apabila jumlah asset yang dimiliki rumah tangga ≤ 5 jenis, dan tinggi apabila jumlah asset yang dimiliki rumah tangga > 5 jenis. Secara keseluruhan, dari 35 rumah tangga perubahan kepemilikan asset rumah tangga antara sebelum dan sesudah mengikuti program SPP yaitu sebesar 11.4 persen. Tingkat kepemilikan asset pada rumah tangga responden mengalami peningkatan sebesar 11.4 persen dari sebelum mengikuti program.

Barang elektronik yang sebagian besar dimiliki oleh responden adalah televisi, handphone, rice cooker, dan kompor gas. Penggunaan barang elektronik seperti kompor gas, kulkas, rice cooker, dan handphone dimiliki responden untuk mengembangkan usaha mereka. Responden dengan jenis usaha pengolahan makanan menggunakan rice cooker, kulkas, dan kompor gas untuk memudahkan mereka dalam membuat makanan/minuman yang akan dijual, seperti misalnya membuat es batu dan es mambo, serta memudahkan mereka dalam menyimpan bahan kebutuhan untuk usaha.

Penggunaan handphone dalam mengembangkan jenis usaha pada umumnya digunakan bagi responden yang memiliki jenis usaha menjual pakaian atau sembako melalui sistem kredit dan yang memiliki usaha menjual pulsa. Bagi responden yang menjual produk/barang dengan sistem kredit pada umumnya menggunakan handphone untuk memudahkan mereka untuk menghubungi pembeli

dan juga pemasok barang. Jumlah asset kendaraan motor, sebelum mengikuti program jumlahnya sebanyak 16 orang, setelah mengikuti program jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 20 orang. Sebagian besar responden membeli kendaraan bermotor melalui kredit.

Perhiasan yang dimiliki responden sebelum mengikuti program jumlahnya sebanyak 10 orang, setelah mengikuti program jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 20 orang. Lahan/sawah yang dimiliki responden sebelum mengikuti program jumlahnya sebanyak 4 orang, dan setelah mengikuti program jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 6 orang. Sebagian dari responden mempunyai lahan kosong yang tidak difungsikan baik untuk keperluan pengembangan tempat tinggal maupun untuk kepentingan usaha. Sementara terdapat responden yang memfungsikan lahan kosong untuk mengembangkan usaha.

ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK RESPONDEN TERHADAP POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hubungan Usia dengan Pola Pengambilan Keputusan

Sebagian besar responden memiliki usia pada kategori dewasa pertengahan dengan persentase laki-laki sebesar 62.9 persen dan perempuan sebesar 74.3 persen. Pada responden laki-laki, kategori usia dewasa pertengahan dan dewasa tua sebagian besar pengambilan keputusan didominasi oleh istri yaitu masing-masing sebanyak 18 orang (81.8%) dan 10 orang (83.3%). Sementara, pada dewasa awal pengambilan keputusan seluruhnya didominasi oleh suami. Pada responden perempuan, baik pada kategori dewasa awal, dewasa pertengahan, maupun dewasa tua sebagian besar pengambilan keputusan lebih didominasi oleh istri. Jumlah terbesar pada responden dengan pengambilan keputusan dominan istri adalah pada kategori dewasa pertengahan yaitu sebanyak 21 orang (80.8%).

Dapat disimpulkan bahwa baik pada responden suami ataupun responden istri pengambilan keputusan dominan istri sebagian besar adalah responden dengan kategori usia dewasa pertengahan. Hasil uji statistik menggunakan Chi-square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara usia dengan pola pengambilan keputusan. Hal ini berarti usia responden tidak mempengaruhi pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha.

Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Pola Pengambilan Keputusan

Sebagian besar responden laki-laki mempunyai jenis pekerjaan di sektor non usaha. Sebagian besar laki-laki yang bekerja pada sektor non usaha dan sektor usaha pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha lebih didominasi oleh istri, akan tetapi jumlah yang bekerja pada sektor non usaha lebih besar yaitu dengan jumlah 17 orang (81.0%). Baik responden yang bekerja di sektor non usaha maupun di sektor usaha, sebagian besar pola pengambilan keputusan didominasi oleh istri yaitu sebanyak 25 orang (80.6%), hal ini karena memang seluruh responden perempuan adalah peserta SPP yang memiliki jenis usaha. Sementara sebanyak 4 orang (12.9%) yang bekerja di sektor usaha

pengambilan keputusan lebih didominasi oleh suami.

Perempuan yang bekerja pada sektor non usaha adalah yang memiliki pekerjaan ganda ataupun yang menyerahkan pengelolaan usaha pada orang lain. Berdasarkan jenis pekerjaan, di sektor non usaha ataupun sektor usaha dapat diketahui bahwa sebagian besar istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan dana pinjaman. Pada suami yang bekerja di sektor non usaha antara suami dan istri memang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda sehingga pemanfaatan dan pengelolaan usaha lebih diberikan kepada istri sebagai peserta SPP. Pengambilan keputusan dominan istri pada suami dan istri yang memiliki jenis usaha bersama (dikelola bersama), pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh suami atau bersama-setara.

Hasil uji statistik menggunakan Chi-square pada jenis pekerjaan responden laki-laki dan responden perempuan menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara jenis pekerjaan dengan pola pengambilan keputusan. Jenis pekerjaan responden tidak mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha.

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pola Pengambilan Keputusan

Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan pada kategori rendah. Baik responden laki-laki maupun responden perempuan keduanya menunjukkan hasil bahwa sebagian besar pengambilan keputusan dominan istri adalah responden dengan pendidikan rendah masing-masing dengan jumlah 20 orang (76.9%) dan 22 orang (82.1%). Keduanya menunjukkan bahwa baik tingkat pendidikan rendah maupun tinggi sebagian besar pengambilan keputusan didominasi oleh istri. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji korelasi Tau Kendall's menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara tingkat pendidikan dengan pola pengambilan keputusan. Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha, semakin tinggi tingkat pendidikan suami tidak berarti semakin dominan suami terhadap pengambilan keputusan dan semakin rendah tingkat pendidikan istri tidak berarti perannya dalam pengambilan keputusan semakin rendah.

ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK RESPONDEN TERHADAP CURAHAN WAKTU KERJA

Hubungan Usia dengan Curahan Waktu Kerja

Usia tidak berpengaruh signifikan dengan curahan waktu kerja responden. Pada kegiatan produktif, baik pada kategori usia dewasa awal, dewasa pertengahan, dan dewasa tua, menunjukkan bahwa curahan waktu kegiatan produktif responden laki-laki adalah tergolong tinggi. Responden perempuan yang memiliki curahan waktu kegiatan produktif yang tinggi adalah dengan usia yang tergolong pada dewasa awal dan dewasa tua. Curahan waktu kerja produktif responden yang tinggi pada semua kategori umur karena pada kategori usia baik dewasa awal, dewasa pertengahan, maupun dewasa tua termasuk dalam kategori usia angkatan kerja yaitu usia > 15 tahun

ke atas. Usia juga tidak menjadi persyaratan dan ketentuan responden dalam melakukan kegiatan sosial. Oleh karena itu, pada semua kategori umur, kegiatan sosial responden laki-laki maupun perempuan cenderung tinggi. Kegiatan reproduktif responden perempuan yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh usia. Akan tetapi lebih dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki yang dipegang oleh rumah tangga responden.

Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Curahan Waktu Kerja

Jenis pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap curahan waktu kerja responden pada kegiatan produktif, sosial, dan reproduktif. Kegiatan produktif, responden laki-laki baik yang bekerja di sektor non usaha maupun di sektor usaha, sebagian besar memiliki curahan waktu kegiatan produktif yang tinggi dengan persentase masing-masing sebesar 71.4 persen dan 69.2 persen. Akan tetapi, pada responden perempuan yang bekerja di sektor non usaha seluruhnya memiliki kegiatan produktif yang rendah. Hal ini karena jumlah jam kerja mereka yang rendah, sedangkan jam kerja mereka dalam mengelola usaha juga tergolong rendah. Responden perempuan yang bekerja di sektor usaha mayoritas memiliki kegiatan produktif yang tinggi.

Kegiatan sosial responden laki-laki yang bekerja pada sektor non usaha sebagian besar memiliki curahan waktu kegiatan sosial yang tergolong tinggi, sementara responden yang bekerja di sektor usaha sebagian besar memiliki curahan waktu kegiatan sosial yang rendah. Kegiatan sosial responden perempuan baik yang bekerja di sektor non usaha maupun di sektor usaha adalah tergolong tinggi. Kegiatan reproduktif responden laki-laki baik yang bekerja di sektor non usaha maupun di sektor usaha, sebagian besar responden sama-sama memiliki curahan waktu kegiatan reproduktif yang rendah. Sementara pada responden perempuan yang bekerja di sektor non usaha maupun di sektor usaha memiliki kegiatan reproduktif yang tinggi. Kegiatan reproduktif responden perempuan yang mayoritas adalah tinggi, karena dalam rumah tangga responden masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa kegiatan reproduktif adalah tanggung jawab perempuan sebagai istri.

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Curahan Waktu Kerja

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan dengan curahan waktu kerja responden dalam kegiatan produktif, reproduktif, dan sosial. Kegiatan produktif responden laki-laki dan perempuan dengan pendidikan tinggi maupun rendah, memiliki curahan waktu kegiatan produktif yang tinggi. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingginya waktu kerja produktif responden. Hal ini karena sebagian besar responden bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan syarat pendidikan seperti pada pekerjaan di sektor formal. Kegiatan sosial responden baik yang memiliki pendidikan rendah maupun tinggi, memiliki curahan waktu yang tergolong tinggi. Sama halnya dengan kegiatan produktif, kegiatan sosial yang dilakukan responden di lingkungan sosial tidak memerlukan persyaratan pendidikan, karena kegiatan sosial yang dilakukan lebih bersifat sukarela yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan mengembangkan aspirasi dan kemandirian masyarakat.

Kegiatan reproduktif yang dilakukan responden laki-laki baik pada pendidikan rendah maupun tinggi sama-sama menunjukkan curahan waktu yang tergolong rendah. Akan tetapi pada responden perempuan, baik yang memiliki pendidikan rendah maupun tinggi, sama-sama menunjukkan kegiatan reproduktif yang tergolong tinggi. Kegiatan reproduktif responden perempuan yang mayoritas adalah tinggi, karena dalam rumah tangga responden masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa kegiatan reproduktif adalah tanggung jawab perempuan sebagai istri.

ANALISIS HUBUNGAN POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI

Hubungan Pola Pengambilan Keputusan terhadap Pemanfaatan Dana Pinjaman dan Pengelolaan Usaha dengan Tingkat Pendapatan

Kategori tingkat pendapatan rendah, sedang, dan tinggi jumlah penyebaran pola pengambilan keputusan terbesar adalah pada kategori pengambilan keputusan dominan istri. Sebesar 25.0 persen dengan pengambilan keputusan dominan istri adalah dengan pendapatan rendah, 53.6 persen dengan pendapatan sedang, dan 21.4 persen dengan pendapatan tinggi. Sebagian besar pola pengambilan keputusan dominan istri adalah responden dengan tingkat pendapatan sedang. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara pola pengambilan keputusan dengan tingkat pendapatan.

Pengambilan keputusan yang dominan istri tingkat pendapatan rumah tangga cenderung rendah yaitu dengan persentase sebesar 25.5 persen. Semakin tinggi kontrol istri dalam pemanfaatan dana pinjaman serta pengelolaan usaha maka tingkat pendapatan rumah tangga cenderung rendah. Kontrol istri yang tinggi dengan pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha tidak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga apabila tidak adanya upaya untuk meningkatkan hasil/keuntungan. Sebagian besar jenis usaha responden adalah usaha kecil yang tidak memerlukan dana yang besar dan keuntungan yang tidak terlalu besar.

Hubungan Pola Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga terhadap Pemanfaatan Dana Pinjaman dan Pengelolaan Usaha dengan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga responden sebagian besar mengalami penurunan, yang berarti alokasi pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan (pangan) semakin rendah seiring meningkatnya pendapatan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rendanikusuma (2012) bahwa hukum ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi pula persentase atau porsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan (semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan (Rendanikusuma, 2012). Sebesar 53.6 persen responden dengan pola pengambilan keputusan dominan istri menyatakan bahwa pola konsumsi setelah mengikuti program adalah rendah, dan sebanyak 46.4 persen menyatakan bahwa pola konsumsi tinggi. Pada pola pengambilan keputusan bersama-sama sebagian responden menyatakan pola konsumsi setelah mengikuti program adalah rendah dan sebagian menyatakan pola konsumsi tinggi.

Sebesar 40.0 persen responden dengan pola pengambilan keputusan dominan suami menyatakan pola konsumsi setelah mengikuti program adalah rendah dan sebesar 60.0 persen menyatakan pola konsumsi tinggi. Tidak terdapat hubungan antara pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha dengan pola konsumsi rumah tangga setelah mengikuti program SPP. Sebagian besar responden menyatakan bahwa konsumsi terhadap bahan makanan tidak berubah walaupun pendapatan mereka mengalami peningkatan.

Hubungan Pola Pengambilan Keputusan terhadap Pemanfaatan Dana Pinjaman dan Pengelolaan Usaha dengan Kesempatan Usaha

Kesempatan usaha dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuan rumah tangga responden untuk membuka usaha baru setelah mengikuti program SPP. Sebagian besar pengambilan keputusan dominan istri menyatakan bahwa setelah mengikuti program tidak mudah untuk membuka usaha baru yaitu sebanyak 48 orang (85.7%) dan sebanyak 8 orang (14.3%) menyatakan bahwa mudah untuk membuka usaha baru. Pengambilan keputusan bersama-sama sebagian responden menyatakan tidak mudah dan sebagian menyatakan mudah dalam membuka usaha baru. Pada pengambilan keputusan dominan suami sebanyak 6 orang (60.0%) menyatakan bahwa tidak mudah dan sebanyak 4 orang (40.0%) menyatakan mudah untuk membuka usaha baru. Tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha dengan kesempatan usaha. Dapat disimpulkan bahwa pola pengambilan keputusan tidak mempengaruhi kesempatan usaha, tidak berarti semakin dominan istri atau semakin dominan suami dalam pengambilan keputusan maka semakin mudah dalam membuka usaha baru. Sebagian besar responden menyatakan bahwa ketidakmudahan membuka usaha baru karena belum mempunyai dana yang cukup untuk dapat membuka usaha baru yang diinginkan.

Hubungan Pola Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga terhadap Pemanfaatan Dana Pinjaman dan Pengelolaan Usaha dengan Kepemilikan Asset

Kepemilikan asset adalah jumlah asset yang dimiliki oleh responden yang diukur dengan kepemilikan lahan/sawah/tanah, kendaraan, dan barang elektronik. Sebagian besar yaitu sebesar 57.1 persen dengan pengambilan keputusan dominan istri menyatakan bahwa kepemilikan asset rumah tangga tinggi dan sebesar 42.9 persen menyatakan kepemilikan asset rendah. Pengambilan keputusan bersama-sama seluruh responden menyatakan kepemilikan asset rendah dan pada pengambilan keputusan dominan suami sebesar 80.0 persen menyatakan kepemilikan asset tinggi dan 20.0 persen menyatakan kepemilikan asset rendah. Tidak terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha dengan kepemilikan asset. Baik pada pengambilan keputusan dominan suami maupun dominan istri menunjukkan kepemilikan asset rumah tangga yang cenderung tinggi. Pengambilan keputusan dominan suami sebagian besar kepemilikan asset tergolong tinggi dengan persentase sebesar 72.7 persen. Sementara pada pengambilan keputusan dominan istri menunjukkan bahwa sebagian besar kepemilikan asset tergolong tinggi yaitu dengan persentase sebesar 58.2 persen.

ANALISIS HUBUNGAN CURAHAN WAKTU KERJA DENGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI

Hubungan Curahan Waktu Kerja Responden Perempuan dengan Kondisi Sosial-Ekonomi Rumah Tangga

Indikator kondisi sosial-ekonomi yang berhubungan signifikan dengan curahan waktu kerja adalah tingkat pendapatan dan kesempatan usaha). Curahan waktu kerja kegiatan produktif istri mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan. Kegiatan produktif responden yang rendah, tingkat pendapatan responden cenderung rendah dan sedang, yaitu dengan persentase masing-masing sebesar 3.68 persen dan 47.4 persen. Sementara, responden dengan kegiatan produktif tinggi, tingkat pendapatan cenderung sedang dan tinggi, dengan persentase sebesar 56.2 persen dan 37.5 persen. Hal ini berarti, jika perempuan mempunyai peran dalam kegiatan produktif dan terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, maka semakin meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Curahan waktu kegiatan reproduktif mempunyai hubungan yang bersifat negatif dengan kesempatan usaha. Curahan waktu kegiatan reproduktif responden perempuan yang tinggi, maka kemampuan responden dalam membuka usaha baru semakin tidak mudah. Kemampuan responden perempuan untuk membuka usaha baru membutuhkan lebih banyak jumlah jam kerja pada kegiatan produktif, sedangkan jumlah jam kerja pada kegiatan reproduktif yang semakin tinggi, menyebabkan jam kerja kegiatan produktif perempuan semakin rendah. Oleh karena itu, selain karena belum cukupnya dana untuk membuka usaha baru, jam kerja kegiatan reproduktif perempuan yang masih tinggi, menyebabkan tidak mudahnya kemampuan perempuan untuk membuka usaha baru. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka belum mampu untuk membuka usaha kembali karena masih mempunyai tanggungan untuk mengurus rumah tangga, misalnya keajaiban untuk mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tinggi, sebagian besar tidak mudah untuk membuka usaha baru.

Curahan waktu kerja produktif tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pola konsumsi, kesempatan usaha, dan kepemilikan aset. Pola konsumsi rumah tangga lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin meningkat pendapatan rumah tangga, konsumsi terhadap bahan makanan semakin rendah. Curahan waktu kerja kegiatan produktif responden yang tinggi, tidak mempengaruhi kesempatan usaha. Baik responden yang memiliki curahan waktu kerja rendah maupun tinggi, sama-sama menyatakan bahwa tidak mudah untuk membuka peluang usaha baru. Curahan waktu kerja produktif responden tidak berhubungan dengan kepemilikan aset. Sebagian besar kegiatan produktif responden adalah rendah, akan tetapi tingkat kepemilikan asetnya adalah tinggi.

Hubungan Curahan Waktu Kerja Responden Laki-laki dengan Kondisi Sosial-Ekonomi Rumah Tangga

Indikator kondisi sosial-ekonomi yang memiliki hubungan yang signifikan dengan curahan waktu kerja responden laki-laki adalah pada kegiatan produktif dengan pola konsumsi dan kepemilikan aset, kegiatan sosial dengan tingkat pendapatan, dan pada kegiatan reproduktif dengan tingkat pendapatan. Curahan waktu kegiatan produktif laki-laki mempunyai hubungan yang signifikan dengan

pola konsumsi. Semakin tinggi curahan waktu kegiatan produktif responden, maka semakin tinggi pola konsumsi rumah tangga. Sebesar 60.0 persen responden dengan kegiatan produktif tinggi memiliki pola konsumsi yang tergolong tinggi.

Curahan waktu kerja kegiatan produktif mempunyai hubungan yang negatif dengan kepemilikan aset. Kegiatan produktif responden laki-laki yang tinggi, kepemilikan aset rumah tangga semakin rendah. Sementara kegiatan produktif responden laki-laki yang semakin rendah, kepemilikan aset rumah tangga cenderung tinggi. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di lokasi penelitian menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Berdasarkan kepemilikan aset rumah tangga responden yang mengalami peningkatan setelah mengikuti program, maka seharusnya kegiatan produktif laki-laki yang tinggi akan semakin meningkatkan kepemilikan aset rumah tangga.

Curahan waktu kerja kegiatan sosial responden laki-laki memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi kegiatan sosial responden laki-laki, maka semakin tinggi tingkat pendapatan. Akan tetapi, pada kondisi yang nyata di lokasi penelitian, tidak terdapat hubungan antara kegiatan sosial dengan tingkat pendapatan. Hal ini karena dalam kegiatan sosial yang diikuti oleh responden tidak ada kegiatan yang mengindikasikan dapat menambah penghasilan responden. Kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, membantu hajatan tetangga, musyawarah desa, dan rapat RT/RW sifatnya hanya sukarela dan tujuan responden untuk mengikuti kegiatan sosial bukan untuk mencari tambahan penghasilan.

Curahan waktu kegiatan reproduktif responden laki-laki memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi kegiatan reproduktif laki-laki, maka semakin rendah tingkat pendapatan rumah tangga. Kegiatan reproduktif laki-laki yang tinggi, tingkat pendapatan rumah tangga cenderung rendah, dengan persentase sebesar 50.0 persen. Sementara pendapatan tinggi hanya sebesar 0.0 persen. Sebaliknya, kegiatan reproduktif laki-laki yang semakin rendah, maka semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga membutuhkan jam kerja yang lebih banyak (lebih produktif) dalam mencari nafkah, sedangkan apabila semakin tinggi kegiatan reproduktif responden, maka kegiatan produktif semakin rendah. Oleh karena itu, jam kerja kegiatan reproduktif laki-laki yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian pada peserta program SPP menyimpulkan bahwa pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha sebagian besar didominasi oleh istri. Istri mendominasi pengambilan keputusan pada aktivitas keputusan meminjam dana, pemanfaatan dana pinjaman, penentuan jenis usaha, pengelolaan usaha, dan penentuan harga. Rata-rata curahan waktu kerja pada kegiatan produktif laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Sementara, pada kegiatan sosial dan kegiatan reproduktif rata-rata curahan waktu kerja lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal ini, perempuan mengalami beban kerja

berlebih (overburden) karena jumlah curahan waktu kerja lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Kondisi sosial-ekonomi rumah tangga peserta SPP mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah mengikuti program. Secara keseluruhan, tingkat pendapatan dan kepemilikan aset rumah tangga mengalami peningkatan setelah mengikuti program. Tingkat pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah mengikuti program tergolong tinggi. Sementara, kepemilikan aset rumah tangga sebelum mengikuti program tergolong rendah, dan sesudah mengikuti program tergolong tinggi. Akan tetapi, semakin meningkatnya pendapatan, pola konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sesudah mengikuti program, namun sebagian besar pola konsumsi responden adalah tinggi. Sebagian besar rumah tangga peserta SPP tidak mudah untuk membuka usaha baru setelah mengikuti program.

Karakteristik responden ternyata tidak memiliki hubungan dengan curahan waktu kerja responden. Baik usia, jenis pekerjaan, maupun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi curahan waktu kerja responden pada tiga kegiatan aktivitas. Karakteristik responden tidak mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga terhadap pemanfaatan dana dan pengelolaan usaha. Pola pengambilan keputusan istri yang dominan tidak dipengaruhi oleh usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Curahan waktu kerja kegiatan produktif responden perempuan memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi curahan waktu responden perempuan dalam kegiatan produktif, maka semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga. Curahan waktu kerja kegiatan reproduktif perempuan memiliki hubungan dengan kesempatan usaha. Semakin tinggi curahan waktu kegiatan responden dalam kegiatan reproduktif, maka semakin tidak mudah kesempatan responden untuk membuka usaha baru. Pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Pengambilan keputusan istri yang dominan, pendapatan rumah tangga cenderung rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang diajukan oleh peneliti, yaitu:

1. Sebaiknya, pelatihan tidak hanya diberikan kepada anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) dan ketua kelompok saja, tetapi juga diberikan kepada anggota kelompok. Materi pelatihan dapat berupa informasi mengenai keterampilan kewirausahaan.
2. Dalam rumah tangga peserta program, sebaiknya diupayakan terciptanya rumah tangga yang responsif gender. Dengan demikian, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dapat seimbang dan menghindari beban kerja berlebih (overburden) pada perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adianti G. 2005. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

kemiskinan di DKI Jakarta (Studi komparatif di permukiman kumuh dan tidak kumuh) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Arkaniyati. 2012. Kesetaraan dan keadilan gender dalam usahatani bawang merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[BPS] Badan Pusat Statistik (ID). 2012. Berita resmi statistik: Badan Pusat Statistik. No 06/01/Th. XV, 2 Januari 2013. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 30 Januari 2013]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan13.pdf

Hadiprakoso A. 2005. Penguatan peran gender dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin: Studi kasus kelompok Dasa Wisma Desa Sudagaran [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hasanudin T M. 2009. Relasi gender dalam perspektif akses dan kontrol terhadap sumberdaya: Kasus pada Sentra Industri Gerabah di Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hubeis AVS. 2010. Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa. Bogor (ID): IPB Press.

[Inpres] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Iskandar S, Mahmud A, Muslim. 2010. Karakteristik dan akar masalah kemiskinan kasus pada 4 tipologi desa di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, hlm.122-134. [Internet]. [Diunduh tanggal 28 Agustus 2012]. Tersedia pada:

http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/1290/JEP_Nuo.11_Vol.1_9_Syaifuddin.pdf?sequence=1.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (ID). 2008. Petunjuk teknis operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (ID). 2007. Pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Mugniesyah SS. 2006. Materi bahan ajar pendidikan orang dewasa. Bogor (ID): Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

Murniati ANP. 2004. Getar gender: perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM. Magelang (ID): Indonesia Tera.

Nainggolan A. 2005. Analisis gender terhadap keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Kasus di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Nikijuluw VPH. 2001. Aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir dan strategi pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. di dalam : Dietriech G. Bengen. Prosiding pelatihan pengelolaan wilayah pesisir terpadu; Bogor, 29 Oktober-3 November 2001. Bogor(ID): Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2012] Halaman 14. Tersedia pada: http://www.crc.uri.edu/download/Proceeding_ToT_ICM.pdf#page=17.
- Nugroho I, Dahuri R. 2004. Pembangunan wilayah: perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta (ID): LP3ES.
- Nugroho R. 2008. Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Prasetyo PE, Maisaroh S. 2009. Model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Jurnal Trikonomika Volume 8, Nomor 2. [Internet]. [Diunduh tanggal 28 Agustus 2012] Tersedia pada: <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/19/jbptunpaspp-gdl-pekoprasset-922-7-7.eko.pdf>.
- Prastiwi DL. 2012. Analisis gender terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan CSR bidang pemberdayaan ekonomi lokal PT Holcim Indonesia Tbk (Kasus: Baitul Maal wa Tamwil/BMT Swadaya Pribumi, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Puspitawati H. 2012. Gender dan keluarga: konsep dan realita di Indonesia. Bogor (ID): IPB Press.
- Putri HM, Yuliaty C. 2009. Potensi perempuan Bali dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut. di dalam : Nasution, Hikmah, editor. Dinamika peran gender dan diseminasi inovasi. Jakarta (ID) : Badan Riset Kelautan dan Perikanan. hlm 65-67.
- Rendanikusuma R. 2012. Analisis tingkat kesejahteraan dari perspektif dana sosial di era desentralisasi [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Saleha Q. 2003. Manajemen sumberdaya keluarga: suatu analisis gender dalam kehidupan keluarga nelayan di pesisir Bontang Kuala, Kalimantan Timur [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Shiva V. 1997. Bebas dari pembangunan: perempuan, ekologi, dan perjuangan hidup di India. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode penelitian survei. Jakarta (ID): LP3ES.
- Sulistiawati A. 2011. Analisis gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Kasus di Desa Kemang, Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Vantina ANW, Pratama BS, Fahrizal R. 2008. Keadilan gender dalam pengambilan kebijakan: antara harapan dan kenyataan (Studi kasus pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2008). Jurnal Sosial-Politika, Vol.15, No.1, Juli 2008 [Internet]. [Diunduh 16 Januari 2012]. Tersedia pada <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1510887113.pdf>
- Widodo T. 2006. Peran sektor informal terhadap perekonomian daerah: pendekatan Delphi-IO dan aplikasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 21, No. 3, 2006, 254-267. [Internet]. [Diunduh tanggal 30 Januari 2013]. Tersedia pada <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/21306254267.pdf>
- Wirartha IM. 2001. Ketidakadilan jender yang dialami pekerja perempuan di daerah pariwisata. [Internet]. [Diunduh tanggal 10 September 2012]. Terdapat pada: [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(6\)%20soca-wirartha-ketidakadilan%20gender.pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(6)%20soca-wirartha-ketidakadilan%20gender.pdf).
- Yulisti M, Nasution Z. 2009. Produktivitas istri dalam penguatan ekonomi rumah tangga nelayan. di dalam: Nasution Z, Hikmah, editor. Dinamika peran gender dan diseminasi inovasi. Jakarta (ID): Badan Riset Kelautan dan Perikanan. hlm 9.